

27 | PRODUK MAKAREL BERCACING



- | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 1. | ABC | 15. | KINGS'S FISHER |
| 2. | ABT | 16. | LSC |
| 3. | AYAM BRAND | 17. | MAYA |
| 4. | BOTAN | 18. | NAGO/NAGOS |
| 5. | CIP | 19. | NARAYA |
| 6. | DONGWON | 20. | PESCA |
| 7. | DR FISH | 21. | POH SUNG |
| 8. | FARMER JACK | 22. | PRONAS |
| 9. | FIESTA SEAFOOD | 23. | RANESA |
| 10. | GAGA | 24. | S&W |
| 11. | HOKI | 25. | SEMPIO |
| 12. | HOSEN | 26. | TLC |
| 13. | IO | 27. | TSC |
| 14. | JOJO | | |



*SUMBER: BPOM

27 Merek Ikan Kaleng Bercacing

BATAM (BP) - Belum selesai kasus tiga merek produk ikan makarel yakni IO, Farmer Jack, dan HOKI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali merilis 24 merek makarel kalengan yang juga mengandung cacing, Rabu (28/3). Sehingga jumlah produk makarel bercacing bertambah menjadi 27 merek.

Dikutip dari laman BPOM, temuan tersebut setelah BPOM melakukan uji laboratorium terhadap 541 sample ikan dalam kemasan kaleng makarel dari 66 merek yang berbeda. Dari 66 merek tersebut 27 merek di antaranya positif mengandung cacing parasit. Termasuk IO, Farmer Jack, dan HOKI.

Kepala BPOM Penny K Lukito menyampaikan dari 27 merek ikan kaleng yang mengandung cacing itu terdiri

dari 16 merek produk impor dan 11 produk dalam negeri.

"Dominasi produk yang mengandung parasit cacing adalah produk impor," kata Penny dalam rilisnya, Rabu (28/3) malam.

Namun, Penny memastikan, bahan baku dari 11 merek makarel kalengan lokal tersebut didatangkan dari luar negeri alias diimpor.

27 Merek Ikan Kaleng Bercacing

Sambungan dari hal 1

Atas temuan tersebut, BPOM telah memerintahkan kepada importir dan produsen untuk menarik produk masing-masing dari pasaran. Selanjutnya, produk-produk tersebut harus dimusnahkan.

Tak hanya itu, BPOM untuk sementara juga melarang im-

portir memasukkan atau mengimpor ke-16 merek makarel impor tersebut. Sementara untuk 11 merek makarel produksi dalam negeri, untuk sementara produksinya dihentikan. "Sampai audit komprehensif selesai dilakukan," kata Penny.

Penny melanjutkan, BPOM akan terus memantau pelaks-

anaan penarikan dan pemusnahan serta meningkatkan sampling dan pengujian terhadap *sample* lainnya dan semua produk ikan dalam kaleng. Baik produk dalam maupun luar negeri.

Bersama dengan kementerian/lembaga terkait, BPOM juga telah melakukan koordinasi untuk perkuatan peng-

awasan sepanjang rantai produksi ikan sejak penangkapan dan penanganan bahan baku hingga produk jadi.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah memberikan notifikasi kepada Pemerintah Cina terkait dengan bahan baku ikan yang mengandung parasit cacing," katanya. (cha)

Telat Lapor SPT, Denda Rp 1 Juta per Bulan

BATAM KOTA (BP) - Periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan 2017 akan segera berakhir pada 31 Maret untuk SPT Pribadi dan 31 April untuk SPT Badan. Warga Batam yang belum melunasi kewajibannya diimbau segera melapor karena keterlambatan akan dikenai denda Rp 100 ribu per bulan untuk pajak pribadi dan Rp 1 juta untuk pajak badan.

"Kita imbau masyarakat agar jangan melapor mepet-mepet di waktu terakhir agar pelayanan kami bisa berjalan maksimal," kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam Pratama Selatan Gunung Herminanto Siswantoro di kantornya, Rabu (28/3).

Gunung sangat menyayangkan karena meskipun sudah menggunakan sistem *e-Filing* dan sudah berulang kali disosialisasikan, namun masyarakat masih belum kunjung juga paham. "Masih banyak yang tak gunakan, kesadaran masyarakat sangat kurang. Padahal sudah kami kirimkan *e-Filing* di *e-mail* masing-

Telat Lapor SPT, Denda Rp 1 Juta per Bulan

Sambungan dari hal 9

masing wajib pajak," tambahnya.

Ada juga wajib pajak yang kembali meminta *e-Filing* padahal sudah tersimpan di *email* masing-masing. "Dah dikasih sebelumnya malah minta lagi, padahal di *email* sudah ada semua. *E-Filing* itu yang terintegrasi langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online. Dengan itu tidak perlu lagi datang ke kantor pajak," paparnya.

Pantauan *Batam Pos*, Kantor KPP Batam Pratama Selatan dibanjiri puluhan hingga ratusan wajib pajak seminggu belakangan ini. Tujuannya adalah melaporkan SPT pribadi secara manual karena banyak yang tak memahami

bagaimana pelaporan dengan menggunakan *e-Filing*.

"Untuk pelayanan secara manual akan terus kami layani, tapi setelah 1 April tidak ada lagi," jelasnya.

Makanya, sambungnya, sebulan terakhir ini, kantor pajak tersebut menambah jam kerja yang pada mulanya selesai pada pukul 16.00 WIB menjadi pukul 17.00 WIB. Bahkan di hari Sabtu mereka juga buka.

"Selain itu, untuk mengakomodir wajib pajak yang tak bisa menggunakan *e-Filing*, KPP Batam Pratama Selatan membuka kelas pajak," sebutnya.

Upaya ini akan terus dilakukan mengingat target besar yang dibebankan DJP kepada KPP Batam Pratama Selatan.

"Target tahun ini Rp 916 mi-

liar. Memang menurun dari tahun lalu yang hampir mencapai Rp 1 triliun. Penurunan tersebut karena mempertimbangkan kondisi ekonomi Batam yang belum pulih," ungkapnya.

Salah satu wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya, Habli mengatakan *e-Filing* yang diterapkan oleh DJP mulai dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak yang masuk sebagai nasabah BNI.

"Sudah berjalan konsep ini dan penerimaan *e-Filing* selalu ada setiap hari. Ini terobosan bagus karena nasabah tak perlu repot-repot lagi *ngantri* atau datang ke bank. Mereka sudah bisa melaksanakan kewajiban pajak melalui *mobile banking* atau mesin ATM," tutur Habli. (leo)

Penambang Pasir Bayar Upeti

Ke Oknum Pegawai dan Aparat

BATAM KOTA (BP) - Aktivitas penambangan atau pengerukan pasir ilegal di kawasan Panglong, Nongsa dan di sekitar Dam Tembesi, serta sejumlah titik lainnya di Batam memang sulit diberantas. Pasalnya, kegiatan ilegal yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut, melibatkan sejumlah oknum pegawai pemerintahan maupun aparat keamanan.

"Mereka menerima upeti dari para penambang. Makanya tak mungkin bisa diberantas," ujar Wa, salah satu sumber *Batam Pos*, Senin (26/3).

Ia bukan tak percaya dengan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Ditjam Badan Pengusahaan (BP) Batam, maupun Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri. Namun adanya oknum-oknum dari berbagai institusi yang juga menggantungkan hidupnya di sana membuat pencurian pasir terus berlangsung.

Wa yang juga pekerja di salah satu tambang pasir ilegal itu menceritakan, aktivitas penambangan pasir ilegal itu telah ia lakoni mulai sebelum berkeluarga sampai sudah punya anak. "Menghidupi anak istri, ya dari hasil cari pasir di sini," ujar Wa.

Wa mengaku dalam sehari mampu mengantongi uang dari hasil penjualan sekitar Rp 200 ribu. Diakuinya, sebenarnya kalau tak banyak pihak yang datang menarik upeti, penghasilannya bisa lebih besar lagi, bisa Rp 300 ribu per hari. Tapi tamu-tamu yang datang dari beberapa instansi atau institusi meminta upeti banyak.

"Makin gencar pemberitaan di media, bukannya mereka (oknum peminta upeti atau setoran) menghentikan volume kunjungannya ke penambang, justru makin sering datang minta setoran. Kompensasinya mereka menjamin aktivitas kami aman," terang Wa.

Sayangnya, Wa tak berani menyebut secara spesifikasi oknum-oknum dari institusi

maupun instansi yang rutin bertamu meminta upeti. "Itulah yang bisa saya kasih tahu. Kalau saya buka semua, taruhannya nyawa anak istri saya," jelasnya.

Dia mengaku, saat dia tidak di rumah, sejumlah oknum datang meminta setoran. Istrinya pun terpaksa meneleponnya. "Gimana saya tak pusing, tak dikasih, saya takut ditangkap dan tak bisa cari pasir lagi. Dikasih, mereka bukan sekali dua kali datang, dalam seminggu ada yang sampai empat kali datang," ungkapnya.

Ketika ditanya siapa pembeli pasirnya selama ini? Wa mengaku sudah memiliki pembeli tetap. Tiap hari selalu datang mengangkut pasir hasil mengisap menggunakan mesin hisap. "Kalau soal harga, seragam semua di sini. Kami ada perkumpulan koperasi. Dari situlah harga ditetapkan. Kalau pasir di sini itu harganya paling murah, apalagi kalau ada pembeli yang datang langsung bawa angkutan, bisa lebih murah lagi," terangnya.

Bukan hanya Wa saja yang sering didatangi oknum dari institusi ataupun instansi. Beberapa rekannya sesama penambang pasir pun juga sama nasibnya, dimintai upeti atau yang biasa di kalangan mereka disebut setoran. "Tak apalah, daripada mata pencaharian saya diganggu, diintimidasi, selagi saya masih bisa memberi upeti semampu saya, ya saya kasih," ucapnya.

Pengakuan salah satu penambang pasir di kawasan Panglong tersebut selaras dengan pernyataan anggota DPRD Batam dari Komisi III, Jefri Simanjuntak. Kepada *Batam Pos*, Jefri mengakui kenapa selama ini penambangan pasir darat di Batam tak bisa ditutup. Padahal dampak kerusakan lingkungannya sudah luar biasa.

"Kalau untuk menutup itu sebenarnya soal mudah, dalam dua hari bisa saja ditutup semua. Yang sulit kan aktivitas penambangan pasir itu sudah melibatkan semua pihak, ba-

nyak oknum instansi pemerintahan yang ikut menikmati hasilnya. Banyak kepentingan orang besar yang saya maksud pengusaha juga yang menggantungkan pasokan pasir darat itu," ujar politikus asal dapil Sagulung ini.

Polisi Boleh Menangkap

Sebelumnya, Kepala Distamben Provinsi Kepri Amjon mengatakan, semua yang ada di Batam adalah ilegal atau tak berizin semua. Sebab di Batam sendiri memang tidak ada dalam tata ruang satu titik pun untuk tata ruang tambang seperti pasir darat.

Pemko Batam, lanjut Amjon, pernah berkirim surat ke instansi yang dipimpinnya yang isinya ingin membuat tim terpadu untuk menertibkan aktivitas pencurian pasir atau tambang ilegal di Batam. Hal tersebut dinilai Amjon sebenarnya hal yang tak perlu.

"Sudah jelas kok, tata ruang di Batam menegaskan tak ada satu titik pun izin tambang termasuk pasir darat. Mereka itu unsumnya sudah pidana, mencuri pasir. DLH Batam harus tegas, Pemko Batam harus tegas, tangkap mereka. Begitu juga polisi berhak menangkap mereka. Karena apa, unsumnya murni itu pencurian yang masuk ranah pidana," ujarnya.

Tugas dan tanggung jawab Distamben Kepri, lanjut Amjon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan adalah pengawasan, mengontrol, menginvestasi, dan memberikan pengawasan kepada tambang-tambang berizin atau legal yang terdaftar.

"Pengawasan kami terhadap tambang legal. Tapi setelah berizin mereka masih melaksanakan kegiatan di luar amdal, di luar IUP, maka itu adalah jadi tanggung jawab kami untuk memperkarakan atau menindak. Kalaupun ada aktivitas tambang yang tak berizin di kami, itu bukan ranah kami, tapi ranah pemerintah daerah setempat penindakannya," terang Amjon. (ian/gas)

DLH akan Fokus Tangani Limbah dan Cut and Fill

BATAM, PM: Pasca dilantik sebagai pejabat definitif di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie beserta jajarannya dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman, akan melakukan audit limbah atau lingkungan. Mereka juga akan melakukan investigasi tentang tumpahan minyak di Kepri pada 3 sampai 6 April mendatang.

Herman mengatakan, ada

8 perusahaan yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Dari 8 perusahaan itu, enam di antaranya berdomisili di Batam. Sementara sisanya ada di Karimun.

"Investigasi dilakukan bersama tim Menko Kemaritiman, KLHK, Kemenhub, KKP, lembaga Migas dan Dinas DLH Provinsi Kepri dan Kota," kata Herman, Selasa (27/3).

Dia mengatakan, pihaknya berniat akan

menindak kegiatan yang merusak lingkungan di Batam, usai resmi dilantik menjadi Kepala DLH. Sebelum ini, ia tidak bisa fokus karena memimpin di dua tempat, yakni; Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperakimtan), serta Plt Kepala DLH.

"Kita ingin mencoba lebih intens. Kalau dulu saya terbagi dua. Pagi di Perakimtan, siang DLH. Atau pagi

di DLH, siang di Perakimtan. Kalau ini kan saya sudah full di DLH. Tentu harus fokus," ujarnya.

Sejak ditunjuk menjadi Plt Kepala DLH lima bulan lalu, ia sudah memberhentikan beberapa kegiatan cut and fill di berbagai lokasi seperti di Tembesi, Kavling Seroja Kecamatan Sagulung, Kecamatan Nongsa, dan Marina Kecamatan Sekupang.

Penghentian dilakukan karena beberapa sebab,

Masih Banyak Angkot Berkaca Gelap

BATAM KOTA (BP) - Meski sempat dirazia beberapa hari lalu, namun jumlah angkutan kota (angkot) yang mengenakan kaca film gelap masih banyak. Dinas Perhubungan Kota Batam bersama kepolisian akan kembali merazia sampai seluruh angkot tak lagi menggunakan kaca film gelap.

Pantauan *Batam Pos* di Simpang Panbil yang jadi tempat mangkal sopir angkot menunggu penumpang, masih banyak terlihat angkot yang kaca filmnya tidak tembus pandang dari luar. Beberapa sopir mengaku tidak membuka kaca film gelap tersebut karena bukan pemilik angkot.

"Kami ini hanya sopir, bukan pemilik. Jadi kalau mau dibuka harus seizin yang punya," ujar Franky Parhusip, sopir angkot, Rabu (28/3).

Ia juga berharap agar pemilik angkot tersebut bisa membuka kaca film tersebut. "Selain menghindari razia, agar penumpang juga tidak takut naik," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean meminta kesadaran dari semua sopir dan pemilik angkot untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Ia juga berpesan kepada calon penumpang agar tidak naik angkot berkaca film gelap.

"Kisah pemerkosaan beberapa waktu lalu menjadi



F. CECEP MULYANA BATAM POS
Yusfa Hendri

pelajaran. Kita berharap teman-teman sopir untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang," katanya.

Selain itu, ia meminta Dinas Perhubungan dan kepolisian melakukan razia kaca gelap. "Jadi jangan hanya sekali saja dilakukan. Harus terus menerus sampai tak ada lagi yang pakai kaca film gelap," katanya.

Sementara itu, Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri mengatakan bahwa badan usaha angkutan kota (angkot) tidak mempekerjakan sopir pemakai narkoba. Terlebih, bagi mereka yang tidak bisa direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan usaha berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap awak kendaraannya yang dipekerjakan di badan usaha masing-masing. "Masih memungkinkan untuk direhabilitasi, bisa dipekerjakan kembali dengan catatan tidak lagi memakai. Tapi kalau tidak memungkinkan dan susah direhabilitasi, maka jangan dipekerjakan," ucap dia.

Ia mengatakan, harapan ini bukan tanpa alasan. Awak kendaraan yang dalam pengaruh obat terlarang dapat membahayakan penumpang dan pengendara lain.

Seperti diketahui, pada Senin (26/3) lalu Dishub Batam dan BNN Batam menggelar razia dan tes urine terhadap sopir angkot di depan GOR Temenggung Abdul Jamal. Hasilnya, dua sopir angkot positif narkoba.

"Badan usahanya kami tegur. Pemberian Surat Peringatan (SP) 1, kami tunggu hasil resmi dari BNN (sopir apakah direhabilitasi atau tidak). Kami juga belum tahu apakah dua orang yang bersangkutan itu sopir aslinya atau cadangan," papar Yusfa.

Ditanya apa ada kemungkinan sopir lain terindikasi memakai narkoba, Yusfa tak ingin membuat kesimpulan dini. "Untuk razia memang rutin kami lakukan, soal tes urine kami harap BNN dapat bergabung terus," imbuhnya.

Sementara terkait rencana agar setiap angkot harus memasang identitas sopir pada *dashboard* mobil masing-masing, kini terus dipersiapkan. "Sedang kami siapkan formatnya," kata dia.

Hal ini dimaksudkan agar penumpang dapat mudah mencocokkan sopir yang sedang bekerja dengan identitas yang terpampang pada *dashboard*. (ian/adi/rna)